

PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM UPAYA MEMBERANTAS TERORISME

13

Yulia Indahri

Abstrak

Serangkaian aksi terorisme kembali terjadi di Indonesia pada bulan Mei 2018. Ketika alternatif homescholling menjadi bumerang upaya memberantas terorisme, maka pendidikan formal semakin dirasakan berperan penting dalam upaya melawan munculnya akar-akar paham radikal. Upaya ke arah tersebut perlu dimulai bersama-sama, karena beberapa penelitian menyimpulkan mulai terdeteksinya sekolah dan perguruan tinggi yang rentan terhadap paham radikal. DPR RI melalui Komisi VIII dan Komisi X dalam sinerginya dengan pemerintah melalui Kementerian Agama serta kementerian yang mengelola pendidikan baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi harus berperan aktif dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan kebijakan penanggulangan terorisme. Pelaksanaan Revisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga perlu lebih intens dilakukan oleh DPR RI.

Pendahuluan

Rentetan aksi terorisme kembali terjadi di Indonesia pada bulan Mei 2018. Dimulai dari aksi terorisme di rumah penahanan narapidana teroris di Markas Komando Brigade Mobil Depok, Jawa Barat, kemudian serangan bom di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur, serta teror bom lainnya di Markas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan Markas Kepolisian Daerah Riau. Untuk serangan bom di Surabaya, LPSK mendata sebanyak 47 orang korban luka-luka dan delapan orang

korban tewas (republika.co.id, 23 Mei 2018). Kemudian, masih di Riau, pada 2 Juni 2018 Tim Densus 88 Antiteror yang melibatkan personel Brimob dan Gegana serta tim Inafis menangkap seorang tersangka teroris dan dua saksi di Universitas Riau (Media Indonesia, 4 Juni 2018). Penangkapan terduga teroris tersebut menjadi bukti betapa isu lembaga pendidikan telah tersusupi radikalisme sudah mengkhawatirkan.

Menyikapi rentetan tindakan teror tersebut, Presiden menegaskan bahwa pemerintah



akan membasmi terorisme sampai ke akar-akarnya. Secara khusus, menyikapi dilibatkannya anak-anak di bawah umur, Presiden telah menyampaikan rasa prihatin karena seharusnya anak-anak ini menikmati usia kanak-kanaknya, bermain, bersekolah, berkumpul dengan keluarga dan teman-teman. Ideologi terorisme dianggap telah merenggut kebahagiaan masa anak-anak itu. Tetapi, upaya preventif tetap harus dikedepankan dibandingkan upaya represif. Presiden juga memberikan penekanan untuk “membersihkan” lembaga pendidikan dari ajaran sesat terorisme (kompas.com, 25 Mei 2018).

Upaya Presiden untuk membersihkan lembaga pendidikan formal sudah tepat. Namun kenyataannya saat ini alternatif *homeschooling* dijadikan alasan bagi para simpatisan teroris untuk memisahkan anak mereka dari dunia luar. Tulisan ini membahas bagaimana peran lembaga pendidikan menjawab kondisi nyata di lapangan atas kecenderungan radikalisme dan berbagai aksi teror yang terjadi.

“Sekolah” Bermasalah

Di tengah maraknya pemanfaatan teknologi untuk memudahkan setiap orang mendapatkan informasi, tahun 2017, pascateror di Inggris, Kepolisian Inggris sudah mensinyalir kelompok masyarakat yang memisahkan dan mengisolasi diri, yang kemudian menyelenggarakan pendidikan sendiri atau *homeschooling*, merupakan tempat membangun semangat radikal bagi pelaku teror (thetimes.co.uk, 2017). Sama halnya dengan kejadian di Surabaya, pelaku teror tidak menyekolahkan anak,

dan setiap harinya, dengan dalih *homeschooling*, orang tua melakukan propaganda perang, jihad, dan negara kafir dalam keadaan perang (mediaindonesia.com, 2018). Kondisi penyalahgunaan pendidikan dalam keluarga untuk propaganda jihad sudah diprediksi Komisioner Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) sejak dua tahun lalu.

Selain *homeschooling* yang memang rentan terhadap penyelewengan ideologi yang dilakukan orang tua kepada anak, lembaga pendidikan formal tidak luput dari upaya dijadikan lahan tumbuh suburnya paham ekstremisme. Survei beberapa lembaga seperti Wahid Institute, Pusat Pengkajian Islam Masyarakat (PPIM), dan Setara Institute mengindikasikan terjadinya penyebaran ajaran intoleransi dan paham radikalisme di lembaga pendidikan di Indonesia (Mutohar, 2018).

Survei toleransi pelajar Indonesia yang dilakukan oleh Setara Institute (2016) menyimpulkan bahwa 35,7 persen siswa memiliki paham intoleran yang baru dalam tataran pemikiran; 2,4 persen sudah menunjukkan sikap intoleran dalam tindakan dan perkataan; dan 0,3 persen berpotensi menjadi teroris. Survei ini dilakukan atas 760 responden yang sedang menempuh pendidikan SMA Negeri di Jakarta dan Bandung. Angka yang cukup mengkhawatirkan ketika ada keinginan dari pemerintah untuk membersihkan lembaga pendidikan formal dari unsur terorisme, karena hampir separuhnya sudah mengakar.

Kesimpulan penelitian lain terhadap lembaga pendidikan yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah pada tahun 2017, penelitian yang diikuti Mutohar di 20 sekolah

swasta Islam di Jawa Tengah mengidentifikasi tiga tipe sekolah yang rentan terhadap paham radikal. Tiga tipe sekolah tersebut adalah sekolah tertutup, sekolah terpisah, dan sekolah yang mengajarkan identitas Islam murni.

Sekolah tertutup (*closed schools*) mengajarkan sikap yang sempit dan cenderung menutupi ide-ide dan perkembangan dari luar. Kepala sekolah bahkan menjelaskan pentingnya menggunakan peradaban Islam sebagai benteng untuk melawan globalisasi Barat. Selain membenturkan peradaban Islam dan Barat, sekolah juga menekankan pentingnya praktik ajaran Islam versi mereka dan menolak versi Islam yang sebagian besar dianut oleh muslim di Indonesia.

Sekolah terpisah (*separated schools*) hanya akan merekrut guru agama dari kelompok mereka. Sekolah akan menggunakan rekomendasi dari jejaring mereka atau merekrut alumni yang mempunyai paham Islam yang sama. Selain itu, sekolah tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat yang tidak sesuai dengan paham mereka. Sangat berbeda dengan sekolah Islam yang menerapkan konsep terintegrasi (*integrated schools*). Sebagai sekolah Islam dengan konsep terintegrasi, beberapa sekolah yang berafiliasi dengan organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tidak mempermasalahkan latar belakang kelompok Islam yang berbeda.

Sekolah yang mengajarkan identitas Islam murni (*schools with pure Islamic identity*) dapat dilihat dari cara sekolah mengonstruksi identitas muslim. Sekolah yang

berisiko menumbuhkan radikalisme menjadikan Islam sebagai konstruksi identitas tunggal dan menolak identitas-identitas yang lain. Hal ini berbeda dengan sekolah Islam yang lain yang cenderung menganggap bahwa identitas sebagai muslim dan identitas lainnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Identitas tunggal dan penolakan terhadap identitas-identitas lain cenderung memunculkan sikap “kami melawan mereka”, sehingga memunculkan upaya pengkotak-kotakan seperti muslim dan non-muslim, bahkan antarsesama muslim yang memiliki penafsiran agama yang berbeda.

Dari paparan tersebut terlihat bahwa jalur pendidikan formal dan informal sama-sama rentan dan dapat disalahgunakan sesuai dengan ideologi yang dianut oleh pengelola lembaga pendidikan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan nasional, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag) bertanggung jawab terhadap pengelolaan pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan tinggi.

Peran Lembaga Pendidikan

Walaupun di satu sisi ada kondisi nyata yang cukup mengkhawatirkan, di sisi lain pendidikan harus tetap menjadi wahana agar berbagai nilai dapat didiskusikan secara terbuka. Kampanye toleransi yang dilakukan oleh pemerintah akhir-akhir ini diharapkan dapat menjangkau lembaga-lembaga pendidikan di tanah air melalui Kemendikbud,

Kemenag, dan Kemenristekdikti. Sekolah harus dibekali kerangka kerja dan program untuk menumbuhkan sikap moderat dan toleransi. Imbauan dari Kemendikbud agar pihak sekolah berperan aktif dalam melawan bahaya terorisme perlu terus disosialisasikan. Contoh imbauan tersebut, yaitu para guru dan kepala sekolah diharapkan dapat mengajak siswa untuk melakukan beberapa hal, seperti:

1. Menyediakan waktu bicara pada siswa tentang kejahatan terorisme. Siswa menjadikan guru tempat mencari informasi dan pemahaman tentang apa yang sedang terjadi.
2. Membahas secara singkat apa yang sedang terjadi, meliputi fakta-fakta yang telah terverifikasi. Jangan membuka ruang terhadap rumor, isu, dan spekulasi.
3. Memberi kesempatan siswa untuk mengungkapkan perasaannya tentang tragedi/kejahatan yang terjadi. Nyatakan dengan jelas rasa duka kita terhadap para korban dan keluarganya.
4. Mengarahkan rasa kemarahan pada sasaran yang tepat, yaitu pada pelaku kejahatan, bukan pada identitas golongan tertentu yang didasari pada prasangka.
5. Mengarahkan untuk kembali pada rutinitas normal. Terorisme akan sukses apabila mereka berhasil memengaruhi kehidupan sehari-hari dan kehidupan kebangsaan kita.
6. Mengajak siswa berpikir positif. Ingatkan bahwa negara kita telah melalui banyak tragedi dan masalah dengan tegar, gotong royong, semangat persatuan, dan saling menjaga.

7. Mengajak siswa berdiskusi dan mengapresiasi kerja para polisi, TNI, petugas kesehatan yang telah melindungi, melayani, dan membantu kita di masa tragedi. Diskusikanlah lebih banyak tentang sisi kesiapan dan keberanian mereka daripada sisi kejahatan pelaku teror.

Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kemenag di daerah juga harus mampu mengidentifikasi sekolah-sekolah yang rentan terhadap radikalisme dan melakukan langkah persuasif untuk mencegah menyebarnya radikalisme di sekolah tersebut.

Di tingkat pendidikan tinggi, pemerintah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan riset radikalisme di dunia pendidikan guna mengantisipasi radikalisme di ranah kampus. Tidak ada ruang yang benar-benar steril dari radikalisme, termasuk pendidikan tinggi. Beberapa kasus membuktikan para pelaku radikal berasal dari golongan ekonomi mampu dan berpendidikan cukup, bahkan beberapa di antaranya sudah bergelar doktor.

Riset kampus terhadap radikalisme dapat memberi masukan kepada pemerintah mengenai tren radikalisme, termasuk cara mengatasinya. Di beberapa daerah, radikalisme memiliki karakter spesifik dan perlu dipelajari serta diantisipasi dengan cara yang spesifik dan fundamental. Semakin banyak referensi riset kampus yang dimiliki, maka dapat lebih efektif serta efisien membendung tumbuhnya radikalisme.

Dalam konteks ini, pendidikan menjadi proses pengembangan cara berpikir kritis, ajang yang

mendorong pertukaran ide dan cara pandang yang berbeda secara aman. Lembaga pendidikan menjadi tempat untuk menyemai ide-ide inklusif, penghargaan dan kemampuan untuk merespons perbedaan, serta penguatan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan toleransi, terutama sejak tingkat dasar. Lembaga pendidikan bukan sebagai tempat untuk memupuk stigma, kecurigaan, atau membangun ketakutan atas mereka yang berbeda.

Lembaga pendidikan juga merupakan laboratorium, tempat para peserta didik bereksperimen dengan perbedaan, berlatih empati, menguji interaksi dengan sejawat dan otoritas lembaga pendidikan. Dengan demikian, lembaga pendidikan harus mampu melatih dan menghadirkan pengalaman hidup bermasyarakat yang lebih kompleks, sekaligus membekali peserta didik dengan berbagai keterampilan sosial dan keterampilan hidup yang relevan.

Penutup

Pengesahan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dapat dijadikan langkah awal proaktif untuk mempromosikan keterbukaan, keberagaman, integrasi sosial, dan konstruksi identitas yang beragam di lembaga pendidikan di tanah air dan pemberantasan terorisme sampai ke akar-akarnya.

Komisi X DPR RI dengan mitra kerja yang mengurus seluruh jenjang pendidikan dari usia dini sampai pendidikan tinggi negeri dan swasta, serta Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan pengelola jenjang pendidikan dari usia dini sampai pendidikan tinggi keagamaan harus berperan aktif dalam melaksanakan pengawasan

terutama dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang penanggulangan terorisme yang melibatkan lembaga pendidikan.

Referensi

- Astungkoro, Ronggo. (2018). "Delapan Korban Teror Surabaya Minta Perlindungan LPSK", <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/05/23/p960dr430-delapan-korban-teror-surabaya-minta-perlindungan-lpsk>, diakses 25 Mei 2018.
- Harususilo, Yohanes Enggar. (2018). "7 Hal yang Dapat Dilakukan Sekolah Hadapi Bahaya Terorisme", Kompas, <https://edukasi.kompas.com/read/2018/05/14/07560361/7-hal-yang-dapat-dilakukan-sekolah-hadapi-bahaya-terorisme>, diakses 25 Mei 2018.
- Harususilo, Yohanes Enggar. (2018). "Jokowi: Bersihkan Lembaga Pendidikan dari Ideologi Sesat Terorisme", Kompas, <https://edukasi.kompas.com/read/2018/05/20/16402701/jokowi-bersihkan-lembaga-pendidikan-dari-ideologi-sesat-terorisme>, diakses 25 Mei 2018.
- Mutohar, Agus. (2018). "Radikalisme di Sekolah Swasta Islam: Tiga Tipe Sekolah yang Rentan", <http://theconversation.com/radikalisme-di-sekolah-swasta-islam-tiga-tipe-sekolah-yang-rentan-96722>, diakses 25 Mei 2018.
- Natalyn, Ezra. (2018). "Tak Sekolahkan Anak, Teroris Surabaya Beralih Homeschooling", <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1036707-tak-sekolahkan-anak-teroris-surabaya-beralih-homeschooling>, diakses 25 Mei 2018.

- Ravel, Stanly. (2018). "Komnas PA: Bom Bunuh Diri Libatkan Anak Kecil adalah Kejahatan Luar Biasa", <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/15/14123611/komnas-pa-bom-bunuh-diri-libatkan-anak-kecil-adalah-kejahatan-luar-biasa>, diakses 25 Mei 2018.
- Salengke, Haufan Hasyim. (2018). "Radikalisme di Kampus Kian Mencemaskan", *Media Indonesia*, 4 Juni 2018. hlm. 1.
- Setara Institute. "Laporan Survei Status Toleransi Siswa SMA di Jakarta dan Bandung Raya". Jakarta: Setara Institute, 24 Mei 2016.
- Simpson, John. (2017). "Home Schooling is Blamed for Rise of Extremist Islam", <https://www.thetimes.co.uk/article/home-schooling-fuels-extremism-police-chief-neil-basu-warns-671f0kjh2>, diakses 25 Mei 2018.
- Yasadhana, Victor. (2018). "Antidot Terorisme dan Peran Guru", <http://mediaindonesia.com/read/detail/162082-antidot-terorisme-dan-peran-guru>, diakses 25 Mei 2018.



Yulia Indahri
yulia.indahri@dpr.go.id

Yulia Indahri, S.Pd., M.A., menyelesaikan pendidikan S1 Teknologi Pendidikan IKIP Jakarta (1999) dan pendidikan S2 Development Studies University of East Anglia, Norwich (2003). Menjabat sebagai Peneliti Madya dengan kepakaran Pengembangan Budaya Desa-Kota pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI sejak 1999. Beberapa karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Toleransi Umat Beragama di Kota Kupang (*Best Practice* Berakar pada Kearifan Lokal)" (2016), "Permasalahan Organisasi Profesi Guru" (2017), dan "Penanggulangan Bencana dan Peran Masyarakat" (2017).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.